

Email: [uneslawreview@gmail.com](mailto:uneslawreview@gmail.com)Online: <http://review-unes.com/index.php/law>

Volume 2, Issue 2, Desember 2019

## REGARDING DISPUTE AND ARBITRATION

**Hanafi Darwis**

Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Indonesia

E-mail : [hanafidarwis@gmail.com](mailto:hanafidarwis@gmail.com)

### ABSTRACT

*It shall be necessarily acknowledged that a dispute is usually originated from such a situation in which a party feels harmed by the other party. Unsatisfied expression shall come out if there is any conflict of interest. In respect of which, people shall have such a certain way to settle a conflict or dispute itself, in which the process of dispute settlement engaged herein may be taken through both formal and informal approaches. In relation to which, Arbitration Agency may receive a request raised by the parties in such an agreement and give a binding opinion regarding the matters pertaining to the aforementioned agreement, for instance, if there is any interpretation of any unclear provision; there is any addition or variation in the provision with respect to the existence of any new circumstance. Accordingly, the issuance of opinion by arbitration agency shall cause the both parties bound to it, if a party's action is in violation to the aforesaid opinion, it shall be deemed to breach the agreement, and against the aforesaid binding opinion, any legal remedy or protest whatsoever may not be filed either in the form of legal proceeding of Appeal or Cassation.*

**Key words:** *Regarding Dispute, Arbitration.*

### PENDAHULUAN

Pada umum nya pada bagian akhir daripada suatu perjanjian bisnis dicantumkan suatu klausula yang dapat menentukan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka para pihak akan memilih penyelesaian sengketa yang terbaik bagi mereka.

Perlu diketahui dan bila dicermati penyelesaian sengketa melalui pengadilan butuh waktu relatif lama dan perlu biaya Advokasi (biaya pembelaan atau honorarium Pengacara) yang cukup mahal. Oleh karena itu masyarakat mulai beralih ke metode Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (konsiliasi, mediasi, dan arbitrase) yang dikenal dengan istilah ADR ( Alternative Dispute Resolution ).

Seperti di Amerika serikat dan Australia hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui non litigasi ( penyelesaian diluar pengadilan ), ter utama dikalangan pebisnis.

Demikian juga di Indonesia Penyelesaian sengketa melalui cara ini sudah mulai tampak, terutama dikalangan usahawan, walaupun frekuensinya masih rendah. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi suatu konflik (*conflict of interest*).

Masyarakat mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa itu sendiri, dimana proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara formal maupun informal.

Untuk penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan atau litigasi, dan biasanya pada prakteknya proses pengadilan secara formal ada 8 (delapan) kali ber acara di pengadilan yang mesti dilakukan yaitu terdiri dari : gugatan, jawaban, replik , duplik, kesimpulan, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Untuk penyelesaian konflik secara informal, dalam hal ini lebih berbasis pada *kesepakatan* para pihak yang bersengketa melalui : konsiliasi, mediasi dan arbitrase

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara faktual objek penelitian secara sistematis yang kemudian dianalisis mengenai analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berwujud kata-kata,dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Cara – Cara Penyelesaian Sengketa**

1. **Konsiliasi** (*consiliation*) yaitu dimana dialog dilakukan dengan menyertakan/ mempertimbangkan pendapat dari tenaga ahli profesional atas masalah yang dipersengketakan.

Pendapat atau saran dari tenaga ahli yang merupakan sebagai pihak fasilitator tersebut bisa tidak mengikat dan bisa juga mengikat (*binding opinion*), dan hal ini sangat membantu memperkecil masalah-masalah sengketa dimana diperlakukan adaptasi dari kondisi yang berubah dan atau yang belum diatur secara eksplisit dalam perjanjian. *Binding opinion* ini dapat juga dimintakan dari badan institusi arbitrase.

2. **Mediasi** (*mediation*), menurut Joni Emirzon, (“Alternatif penyelesaian Sengketa” 69 : 2001 ), mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat kesimpulan atau keputusan bagi para pihak, akan tetapi menunjang atau sebagai *fasilitator* untuk terlaksana nya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan memberi / tukar pendapat untuk tercapainya mufakat yang secara benar dan adil.

Untuk diketahui dalam hal ini pengambilan keputusan “tetap” oleh para pihak secara konsensus.

Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dalam hal ini adalah proses dimana pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

3. **Arbitrase** , menurut undang-undang No.30 Th. 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu sengketa perdata diluar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Didalam perjanjian arbitrase terdapat berupa kesepakatan yang mencantumkan klausula arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan / bisnis dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

### **Lebih Jauh Tentang Arbitrase**

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesai sengketa, Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perbedaan penafsiran (*dispute*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :
  - a. Kontroversi pendapat (*controversy*).

- b. Kesalahan Pengertian (*misunderstanding*).
- c. Ketidaksepakatan (*disagreement*).
- 2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk didalamnya adalah :
  - a. Sah atau tidak nya kontrak
  - b. Berlaku atau tidak nya kontrak.
- 3. Pengakhiran Kontrak (*termination of contract*).
- 4. Klaim mengenai ganti rugi atas wan prestasi atau perbuatan melawan hukum.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut yaitu dengan pengadilan wasit (*referee*) seumpama ”wasit” dalam pertandingan bola kaki.

Dalam suatu sumber, arbitrase dimaksudkan yaitu sebagai berikut:

“Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedah nya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur Arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator (Abdurrachman.A. 1991 :50).”

Kemudian, menurut undang-undang arbitrase no.30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah : Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum adalah yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Vide Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999.

Dari beberapa defenisi Arbitrase tersebut diatas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase. Karakteristik yuridis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Adanya kontroversi diantara para pihak.
- 2. Kontroversi tsb diajukan kepada arbiter.
- 3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu.
- 4. Arbiter adalah pihak diluar badan peradilan umum.
- 5. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian.
- 6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara.
- 7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Sungguhpun yang nama nya arbitrase itu bermacam ragam nya, pengaturannya juga berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, namun demikian dapat disebutkan bahwa suatu arbitrase modern adalah memiliki empat (4) syarat-syarat minimal sebagai berikut :

1. Badan Pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan arbitrase.
2. Klausula / kontrak arbitrase adalah mengikat dan tidak dapat dibatalkan.
3. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat “final and binding” dan hanya dapat ditinjau oleh badan pengadilan konvensional dalam hal-hal yang sangat khusus dan terbatas.
4. Badan - badan pengadilan konvensional harus dapat mempelancar tugas Arbitrase.

Selain itu terhadap arbitrase modern haruslah juga dilaksanakan minimal enam (6) kriteria sebagai berikut :

1. Selalu dirumuskan dan diterapkan tujuan dan cita-cita terhadap Arbitrase yang mungkin dicapai
2. Ketentuan tentang Arbitrase haruslah merefleksi *common sense* dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di negara yg bersangkutan (*local requirements*).
3. Secara periodik hukum tentang arbitrase selalu diubah tetapi hukum tersebut harus tetap mudah untuk dicerna.
4. Hukum tentang arbitrase harus selalu diperlengkapi oleh mereka yang benar kompeten.
5. Hukum tentang arbitrase harus dilengkapi mengikuti perkembangan kasus-kasus yang diperiksa, tetapi tidak boleh bias.
6. Harus cepat menyerap, merespon dan melaksanakan perubahan-perubahan tanpa perlu membuang waktu.

### **Arbitrase dalam Lintasan Sejarah**

#### **1. Sejarah Arbitrase Pada umum nya**

Menelusuri dari sejarah, sebenarnya cikal bakal Lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani kuno, terus berkembang pada zaman Romawi dan seterusnya dinegara Eropa seperti Inggris dan Belanda. Kemudian menyebar ke Prancis (1250), Denmark (1795) dan USA (1870).

Di Indonesia, sudah lama juga dikenal tentang Lembaga arbitrase ini, bahkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering* ( BRV ) yakni berlaku sejak tahun 1849, yang dalam hal ini juga terdapat pasal tentang Arbitrase.

Undang-undang yang paling tua di dunia ini tentang Arbitrase adalah Arbitrase Act (1697) di Inggris , undang-undang mana sampai sekarang telah berkali di ubah untuk kesempurnaannya.

#### **2. Sejarah Arbitrase Internasional**

Karena adanya interkoneksi antara orang di negara yang satu dengan mereka dinegara yang lain, maka mau tidak mau diperlukan suatu badan dan / atau perangkat

peraturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa diluar badan-peradilan konvensional.

Arbitrase yang berdimensi internasional juga cukup banyak digunakan, dan hal ini tentu dapat dipahami, karena apabila dua pihak dalam perjanjian dari negara yang berbeda maka pada penyelesaian sengketa dalam pengadilan di negara salah satu pihak lebih baik diselesaikan oleh badan arbitrase internasional yang berpusat dinegara lain.

Badan Arbitrase yang paling tua adalah court of arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC) yang bertempat di Paris, berdiri sejak tahun 1923.

Untuk negara-negara berkembang gerakan Asia Africa Legal Consultatif Committee (AALCC) mempunyai pusat arbitase di Malaysia untuk asia, dan kairo untuk Afrika, dengan menggunakan Uncitral Rules (suatu prosedur Arbitrase yg telah Acceptable oleh PBB sejak tahun 1976).

Badan-badan arbitrase lain yang sering juga digunakan dalam sengketa bisnis antara lain adalah Tribunal of Arbitration of the Manchester chamber of Commerce. Netherlands arbitration, Institute Japan Commercial Arbitration Association. Austratralian Centre for International Commercial Arbitration dan lain - lain sebagainya.

### 3. Sejarah Arbitrase di Inggris

Di Inggris, Perkembangan hukum arbitrase cukup pesat sungguhpun pada tahap-tahap awal badan arbitrase ini sangat diawasi dan di wanti-wanti oleh badan-badan pengadilan konvensional. Dalam abad pertengahan di Inggris sistem peradilan dengan menggunakan arbitrase ini telah digunakan oleh para serikat pekerja atau para pedagang dalam transaksi bidang maritime.

Seperti telah disebutkan bahwa badan arbitase internasional yang tertua adalah *The London Court of International Arbitration (LCIA)*

LCIA ini berdiri ini berdiri pada tahun 1892, yang semula bernama *London Chamber of Arbitration* yang didirikan atas inisiatif dari *the corporation of the city of London*. Dan pada tahun 1903 namanya diganti menjadi *The London Court of Arbitration*.

Selanjut nya pada tahun 1998 namanya berubah lagi sehingga menjadi *The London Court Of international Arbitration*.

Memang di Inggris semula beracara di Arbitrase tidak begitu disenangi oleh para ahli hukum dan hakim-hakim konvensional, Sebab disanksikan bahwa para arbiter tidak dapat memutuskan perkara secara benar dan adil. Bahkan dipertengahan abad ke 18 seperti telah dikatakan bahwa di Inggris sudah menjadi trend untuk mengatakan bahwa kontrak arbitrase melanggar prinsip ketertiban umum karena mengenyampingkan bekerjanya badan pengadilan umum.

Disamping itu pada abad ke 18 – 19 para pihak dalam peradilan arbitrase dapat meminta kepada King's Bench untuk mengenyampingkan suatu putusan arbitrase manakala ada kesalahan *judexfactie* atau kesalahan prosedur.

Dalam *common law Procedure Act* (1854) di Inggris kewenangan badan-badan pengadilan konvensional masih sangat besar dalam hal mengawasi putusan-putusan arbitrase.

Bahkan dalam Arbitration Act 1950, meski peraturan tersebut sudah tergolong liberal, pengawasan badan pengadilan juga masih tampak dengan jelas.

Baru dalam Arbitration Act tahun 1979 kewenangan Arbitrase dapat dikatakan tidak lagi dibatasi, dan banding putusan arbitrase ke pengadilan konvensional sudah sangat dibatasi dan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak lawan disamping persetujuan oleh badan pengadilan. Persetujuan dari pengadilan tersebut baru diberikan jika ada alasan-alasan khusus seperti alasan kepentingan umum, atau ada hal-hal yang bersifat fundamental atau alasan - alasan khusus lainnya.

#### 4. Sejarah Arbitrase di Belanda

Karena Praktek hukum arbitrase di Indonesia sekian lama dikuasai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Hindia Belanda ( RV ) yang nota bene berasal dari negeri Belanda, yang berlaku di Indonesia berdasarkan azas konkordansi, maka berbicara tentang hukum Arbitrase di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah arbitase di negeri Belanda. Semula Hukum arbitrase yg diterapkan di negeri Belanda yang bersumber dari kitab Undang-Undang hukum acara perdatanya tidak jauh berbeda dengan praktek yang diterapkan di Indonesia yang berdasarkan kepada RV.

Akan tetapi kemudian dalam perkembangannya ternyata Hukum Arbitrase dinegeri Belanda berbeda dengan hukum arbitrase Indonesia. Hal ini disebabkan kan dua hal pokok sebagai berikut :

- a. Perkembangan Praktek Arbitrase di negeri Belanda yang pesat telah memberi pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan hukum arbitrase disana.

Sementara di Indonesia, praktek hukum arbitrase relatif tidak berkembang, dan penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu tidak populer.

- b. Dibentuk nya peraturan arbitrase yang baru di negeri Belanda yang mulai berlaku sejak 1 desember 1986. Dan peraturan ini merupakan buku keempat yang baru dari kitab hukum Acara Perdata. Mulai dari Pasal 1020 sampai dengan Pasal 1076, sementara peraturan tentang arbitrase yang lama di Belanda termuat dalam pasal 620 sampai dengan pasal 657 Kitab Undang-undang Hukum acara Perdatanya, yang mirip dengan ketentuan dalam pasal 605 sampai dengan pasal 651 RV Indonesia.

Tujuan utama dari dibuatnya buku keempat yang baru dari kitab Undang-undang hukum acara perdata yang baru di negeri Belanda ini adalah sebagai berikut:

- 1) Agar arbitrase lebih menarik
- 2) Agar per undang undangan mudah dibaca dan dipahami
- 3) Agar terdapat kawalan terhadap tercapai nya keadilan dan due process.

Perundang undangan yang baru di negeri Belanda tentang arbitrase ini dibagi kedalam dua bagian title sebagai berikut:

Titel I : Tentang arbitrase di Belanda (Pasal 1020 sampai dengan Pasal 1073)

Titel II : Tentang Arbitrase diluar Belanda (Pasal 1074 sampai dengan Pasal 1076).

## 5. Sejarah Arbitrase Di Indonesia

Di Indonesia, arbitrase sebenar nya juga mempunyai sejarah yang Panjang. Hal ini disebabkan arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang undangan sejak berlakunya kitab undang undang hukum acara perdata Belanda di Indonesia, yaitu sejak mulai berlakunya RV.

Sungguhpun begitu secara institusional, sejarah perkembangan Arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya dengan terbentuk nya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977.

Disamping ketentuan yg mengatur tentang Arbitrase dalam RV. Terdapat juga adanya beberapa ketentuan lain yang juga menyinggung dan terkait tentang arbitrase ini yaitu sbb :

- a. Arbitrase menurut HIR
- b. Arbitrase menurut undang-undang pokok kekuasaan hakim
- c. Arbitrase menurut undang-undang Mahkamah Agung
- d. Arbitrase menurut undang-undang no.30 Tahun 1999
- e. Arbitrase menurut Hukum Adat.



Perlu untuk diketahui dalam hukum Adat juga dikenal adanya badan-badan pemutus adat yang dalam bekerjanya menggunakan prinsip-prinsip yang serupa dengan prinsip penyelesaian sengketa alternatif yang modern. Contoh dari badan pemutus adat adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Minang Kabau.

#### 6. Arbitrase menurut RV

Dahulu nya ketentuan yang mengatur tentang arbitrase adalah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( Reglement op de Bergeerlijk Rechts vordering = RV ) yang terdapat dalam S.1847 – 52 juncto S1849- 63 ).

RV ini sebenarnya merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Bumi Putera adalah HIR (untuk Jawa dan Madura).

Akan tetapi berdasarkan Pasal 337 HIR maka ketentuan tentang Arbitrase yang terdapat dalam arbitrase yang terdapat dalam RV adalah dinyatakan berlaku juga untuk golongan Bumi putera.

Pasal- Pasal dari RV yang mengatur tentang arbitrase adalah mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 yang meliputi lima bagian sebagai berikut :

- a. Bagian I. Pasal 615 sampai dengan pasal 653 tentang persetujuan Arbitrase dan pengangkatan Arbiter.
- b. Bagian II. Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang pemeriksaan perkara didepan Arbitrase.
- c. Bagian III. Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 Ttg Putusan Arbitrase.
- d. Bagian IV. Pasal 641 s/d 647 ttg upaya hukum thd pts arbitrase.
- e. Bagian V. Pasal 648 s/d Psl 651 Ttg berakhirnya Arbitrase.

Namun demikian dengan berlakunya Undang-undang Arbitrase. No.30 tahun 1999, maka keseluruhan ketentuan Arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 81 Undang-undang no.30 Tahun 1999 tersebut. Selengkapnya Pasal 81 tersebut dinyatakan berbunyi sebagai berikut :

“Pada saat Undang - undang ini mulai berlaku , ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara perdata ( Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1847 : 52 ) dan Pasal377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui ( Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblaad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Buitengewesten,Staatsblaad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku”.

#### 7. Arbitrase menurut HIR

Sebenarnya Kitab Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Bumi Putera, baik menurut HIR Maupun RBG tidak mengatur tentang Arbitrase.

Hanya saja lewat Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG ketentuan – ketentuan tentang Arbitrase dalam RV dinyatakan berlaku juga untuk golongan Bumi Putera.

Selengkapnya Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG menyatakannya sebagai berikut:

“Bilamana orang Bumi putera dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh Arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa”.

Dengan adanya Pasal 377 HIR ini sebagaimana diatas, maka sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya telah terdapat landasan hukum bagi Bumi Putera untuk dapat menggunakan sistem pemeriksaan perkara lewat Arbitrase secara Prosedural, sementara secara material, dasar hukum berlaku nya pengadilan arbitrase adalah lewat prinsip “kebebasan berkontrak” seperti yg terdapat dalam pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Namun demikian dalam perjalanan sejarah hukum selanjutnya, maka ketentuan dalam Pasal 377 HIR telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang oleh Undang-undang arbitrase no. 30 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

#### 8. Arbitrase menurut UU Pokok Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang yang mengatur tentang Pokok - pokok kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-undang No.35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Dalam Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 tidak terdapat ketentuan yg mengatur tentang Arbitrase, Bahkan dalam Pasal 10 dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian, ditegaskan oleh pasal 3 ayat (1) undang-undang No.14 Tahun 1970 tersebut bahwa semua Peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan di tetapkan dengan Undang-undang.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, seolah-olah undang-undang tidak memberi tempat untuk sistem penyelesaian melalui arbitrase ini.

Akan tetapi, kesan tersebut adalah tidak benar sama sekali. Hal ini disebabkan dalam penjelsan atas pasal 3 ayat (1) undang-undang No.14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi (*executoir*) dari pengadilan. Tambahan pula eksistensi dan kewenangan peradilan arbitrase ini telah di akui dengan tegas dalam Undang-undang arbitrase No. 30 Tahun 1999, sebelumnya oleh HIR dan sesuai pula dengan “Asas Kebebasan berkontrak“ dalam KUH Perdata Indonesia.

#### 9. Arbitrase menurut Undang-undang Mahkamah Agung

Pernah ada Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang mengakui eksistensi Lembaga Arbitrase ini, yaitu sewaktu berlakunya Undang-undang Mahkamah Agung No.1 Tahun 1950.

Pengakuan kepada institusi arbitrase ini dengan mengukuhkan Mahkamah Agung sebagai Lembaga banding bagi suatu putusan arbitrase, terdapat antara lain dalam Pasal 15 juncto Pasal 108 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 tersebut berturut-turut adalah:

- a. Undang-undang No. 13 Tahun 1965
- b. Undang-undang N0.14 Tahun 1985

#### 10. Arbitrase menurut UU Arbitrase No. 30 Th. 1999

Dengan keluarnya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tsb maka kedudukan dan kewenangan dari Arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat, dikarenakan sudah ada Undang-undang yang mengaturnya.

#### 11. Arbitrase yang Populer

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian Sengketa alternatif yang paling “populer” dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini, dan kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
- b. Biaya lebih murah.
- c. Dapat dihindari expose dari keputusan didepan umum.
- d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks.
- e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada arbitrase.
- f. Para pihak dapat pilih sendiri para arbiternya.
- g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dibidangnya.
- h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
- i. Keputusan Arbitrase umumnya final and binding tanpa harus naik banding atau kasasi.
- j. Proses/prosedur Arbitrase lebih mudah dimengerti masyarakat.
- k. Keputusan Arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan di eksekusi oleh pengadilan dgn sedikit/tanpa review sama sekali.

Untuk diketahui selain itu institusi tersebut ada yg bersifat nasional maupun yg bersifat internasional.

**Adapun jenis Arbitrase terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :**

**1. Arbitrase Adhoc**

Merupakan Arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu, oleh karena itu sifat dari arbitrase Adhoc bersifat “Insidentil”, dimana kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutuskan perselisihan tertentu, maka apabila telah menyelesaikan sengketa dan dengan telah diputuskan perkara tersebut, maka keberadaan dan fungsi Arbitrase Adhoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

**2. Arbitrase Institusional**

Merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat *permanen*, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.

Tentang lembaga Arbitrase di Indonesia yang memberikan jasa Arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya terdapatnya penafsiran ketentuan yang belum jelas, ada penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya, apabila tindakan salah satu bertentangan dengan pendapat tersebut dianggap melanggar perjanjian, dan terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum Banding atau Kasasi.

## **PENUTUP**

Perlu untuk diketahui bahwa mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional yaitu dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri, dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.

Putusan Arbitrase bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak (*final and binding*).

Keputusan Arbitrase bersifat final, berarti putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Tentang putusan arbitrase tersebut dan para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan “apabila” putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan , diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) ter hitung sejak hari pernyataan dan pendaftaran

putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan negeri, yang dimana permohonan tersebut diajukan kepada Ketua pengadilan negeri.

Terhadap putusan Pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Teks :**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001.
- Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : Grasindo. 2004.
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta : Chandra Pratama. 2001.
- Hamid Shahab, *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*. Jakarta : Djambatan. 1996.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni. 1994.
- Munir Fuadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2010
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta. 1996.

### **Peraturan Undang-Undang :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 13 Tahun 1965
- Undang-undang N0.14 Tahun 1985
- Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **Jurnal Karya Imiah**

- Huala Adolf, *Seminar/Makalah : Pokok-Pokok Pikiran dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Hotel Nikko. 9 September 2004.

Iswahjudi A. Karim, *Makalah : Gugatan Sewenang-wenang Investor terhadap Negara.*  
Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Investasi Indonesia, Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia. Jakarta : 3 Juni 2016.